

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH

DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

|  |  |
| --- | --- |
| Menimbang : | 1. bahwa penyelenggaraan pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan pada nilai-nilai filosofi dan budaya yang hidup dalam masyarakat; |
|  | b. bahwa guna mencapai tujuan tersebut, setelah terbentuknya Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah telah mengeluarkan Peraturan Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; |
|  | 1. bahwa dalam perjalanan pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta sampai sekarang telah terjadi perkembangan masyarakat dan pembangunan sehingga bebrapa peraturan daerah yang telah dikeluarkan tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan pembangunan; |
|  | 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. |
|  |  |
| Mengingat : | 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827); |
|  | 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); |
|  | 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); |
|  | 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); |
|  | 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); |
|  | 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107); |
|  | 7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7); |
|  | 8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2); |
|  |  |

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

Pasal 1

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku:

1. 5/Pert./Pem.D/50 tentang Perubahan Peraturan Pajak Penghasilan untuk Tahun 1950 dan Potongan Pajak;
2. 4/Pert./Pem.D/50 tentang Pencabutan tentang Peraturan Lalu Lintas Lapangan Terbang Maguwo;
3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1951 tentang Upah Buruh Pemerintah(Warta Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1951 seri A.1 No. 2);
4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1951 tentang Perubahan Bersanya biaya Pemeriksanaan Tuberculinasi ada Sapi-Sapi Perahan (Warta Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1951 seri A.1 No. 3);
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1951 tentang Menunjuk Pegawai Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diwajibkan mengabsahkan crediet verband (Warta Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1951 seri A.1 No. 4);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1951 tentang Perubahan Tarip Pajak Kendaraan Tahun 1951 untuk luar kota besar Yogyakarta (Warta Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1951 seri A.1 No. 4);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1951 tentang Pemungutan Iuran Pengganti biaya Jembatan Brosot (Warta Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1951 Seri A, 1. No 4) ;
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1951 tentang Perubahan tarip bea pasar (Uang Sapuan) (Warta Dearah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1951;
9. P.D/2/IX/A/'51 tentang Meniadakan Pembekuan Dewan Kalurahan dan Madjelis Permusjawaratan Desa dalam Daerah Istimewa Yogyakarta
10. P.D/1/IX/A/'51 tentang Surat Keterangan Jual/Beli Hewan dalam DIJ (Warta Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1951);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 1952 tentang Uang sdiang, Uang jalan, Uang menginap, Uang Kehormatan, uang representasi dan perangakapan kepegawaian dengan keanggautaan bagi DPR DIY/DPD(Warta Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1953 seri A 1 no. 1);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 1952 tentang Perubahan Tarip Pemasangan Reklame bagi Daerah di luar Kota Besar Yogyakarta(Warta Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1953 seri A 1 no.2);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun1952 tentangTarip Pajak Kendaraan Tahun 1952 untuk Daerah diluar Kota Besar Yogyakarta;
14. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 1952 tentang Pedoman untuk Dewan Pemerintah Daerah DIY(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1952 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 1953 tentang Penyerahan Kekuasaan Pemerintah DIY mengenai Perijinan Penjualan Minuman Keras dan Pajak Penjualan Minuman Keras kpd DPRD Kotapraja Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1953 Nomer 4);
16. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 1953 tentang Pelaksanaan Penyerahan Kekuasaan Otonomi/modebewind dari DIY kpd Kabupaten-Kabupaten di DIY dan penyelesaian penyerahan kekuasaan otonomi/modebewind dari DIY kpd Kotapraja (Kotabesar) Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1954 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1954 tentang Perubahan PERDA DIY No. : 1/1953 mengenai Pajak Kendaraan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1955 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Nomor 19/1954 tentang Pernyataan berlakunya PP No. : 31/1954 hal Pekerja Pemerintah bagi para pekerja DIY (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1960 Nomer 6);
19. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perubahan Peraturan Hal Pajak Kendaraan termasuk dalam Rijskblad Kasultanan 1942 No. : 4 (Pajak Kendaraan Tahun 1950) (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1955 Nomer 2;
20. Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 1954 tentang Perubahan Perauran Hal Pajak Kendaraan termasuk dalam Rijskblad Kasultanan Tahun 1942 No. 4 Pajak Kendaraan Tahun 1951;
21. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 1954 tentang Tarip Pajak Kendaraan Tahun 1952 untuk Daerah diluar Kota Besar Yogyakarta;
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1955 tentang Perubahan salinan pertama (grasse) Credit Verband(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1955 Nomer 2;
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1955 tentang Tugas Belajar(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1955 Nomer 2;
24. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 1955 tentang Perubahan PD No. : 1 Tahun 1952 Hal Uang Sidang, Uang Jalan, Uang Representasi, dan Perangkapan Kepegawaian dengan Keaggotaan bagi DPR DIY/DPD(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1956 Nomer 10;
25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1956 tentang Reorganisasi Jawatan Kerajinan, Perdagangan Perindustrian Koperasi menjadi Perekonomian (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1956 Nomer 21);
26. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pernyataan berlakunya PP No. : 23 Tahun 1955 Hal Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai DIY(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1956 Nomer 20);
27. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1956 tentang Melidnungi Tanda-Tanda dari Sinar Topografi dsb. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1957 Nomer 9);
28. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 1956 tentang Peraturan Sempadan(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1958 Nomer 2);
29. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 1956 tentang Perubahan Batas Daerah Administrasi Kapanewon-Kapanewon Kenteng, Nanggulan dan Pengasih dalam Kabupaten Kulonprogo (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1956 Nomer 21);
30. Peraturan Daerah Nomor 32 tahun 1956 tentang Pemberian Tunjangan dihadi Tua kepada Pamong Kalurahan, Pembantu Pamong/Kepala Dukuh dalam DIY(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1960 Nomer 12;
31. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1957 tentang Pernyataan berlakunya PP No. : 29/1954 Hal Penanggungan Pajak Peralihan dan Pajak Upah Pegawai Negeri oleh Negara bagi pegawai DIY (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1958 Nomer 14);
32. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1958 tentang Mengubah dan menambah Pasal 1 dan 6 dari Peraturan DIY No. : 4 Tahun 1954 (Penyelesian Tanah-Tanah Bekas Lori yang dulu dipergunakan oleh Perusahaan Pertanian Asing yang statusnya termasuk Tanah Pemeritah bebas);
33. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1958 tentang Susunan Badan pemerintahan Esksekutip Adminsitratip DIY(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1958 Nomer 5);
34. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1958 tentang Mengubah Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. : 12 Tahun 1955 Hal Pemberantasan Hama Artona Catoxantha(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1959 Nomer 11);
35. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1958 tentang Pernyataan berlakunya Peraturan Pemerintah No. : 35/1957 Hal Pemberian Tunjangan Kemahalan Umum bagi Pegawai DIY(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1958 Nomer 14);
36. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 1958 tentang Pernyataan berlakunya Peraturan Pemerintah No. : 19 Tahun 1952, Hal Pemberian Pensiun kepada Janda dan tunjangan kepada anak Yatim piatu pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai DIY;
37. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1959 tentang Perubahan Peraturan DIY No. : 17/1954 Hal Usaha Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kaliurang(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1959 Seri A, Nomer 16);
38. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1959 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD DIY(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1958 Seri A, Nomer 14);
39. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1959 tentang Penyerahan Secara Nyata beberapa Urusan DIY kepada Daerah Swatantra Tingkat II Kotapraja Yogyakarta(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1960 Seri A, Nomer 2);
40. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1959 tentang Penyerahan Secara Nyata beberapa Urusan DIY kepada Daerah Swatantra Tingkat II Bantul, Sleman, Kulonprogo dan Gunungkidul(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1960 Seri A, Nomer 5);
41. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1959 tentang Pengesahan Urusan-Urusan Dinas Perburuhan DIY(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1959 Seri A, Nomer 12);
42. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1959 tentang Mengubah dan menambah Peraturan DIY No. : 3/1954 Hal Perlindungan dengan Izin Penaman Tembakau Jenis Virginia dan Vorstenland dan mendirikan perusahaan tembakau, bangunan-bangunan untuk Pemasakan penyelsaian Tembakau tersebut serta penjualannya(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1960 Seri A, Nomer 8);
43. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1959 tentang Pemberian Tunjangan Kematian(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1960 Seri A, Nomer 10);
44. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1959 tentang Pemotongan Hewan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1961 Seri A, Nomer 5);
45. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pemeliharaan kebaikan, kerapian, kebersihan, kesehatan dan ketenteraman dalam DIY(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1964 Seri A, Nomer 6);
46. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1960 tentangnPenjagaan Kesehatan dalam penjualan, pembagian dan pengangkutan Es(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1961 Seri A, Nomer 3);
47. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1960 tentang Mengambil Alih Urusan Pajak Kendaraan Bermotor(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1960 Seri A, Nomer 2);
48. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1960 tentang Mengambil Alih Urusan Pajak Verponding(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1968 Seri A, Nomer 3);
49. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1960 tentang Susunan Organisasi dan Formasi Pegawai InstansiInstansi Pemerintah Daerah DIY(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1963 Seri A, Nomer 2);
50. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1960 tentang Pengubahan Kedua Kali Peraturan Daerah DIY No. 12 Tahun 1955 Hal Pemberantasan Hama Artona Catoxantha(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1961 Seri A, Nomer 1);
51. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1960 tentang Pengubahan Pasal 9 Peraturan Daerah DIY No. : 6 Tahun 1959 Hal Penyerahan Secara Nyata Beberapa Urusan DIY kepada Swatantra Tingkat II Kotapraja Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1961 Seri A, Nomer 1);
52. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1961 tentang Dewan Perancang pembangunan DIY(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1961 Seri A, Nomer 13);
53. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1961 tentang Perubahan Rijksblad Kasultanan Yogyakarta No. : 10 Tahu 1917 pasal 22 ayat 1 Hal Pemeriksaan Kas Daerah Istimewa Yogyakarta(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1961 Seri A, Nomer 18);
54. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1961 tentang Bimbingan dan pengawasan Teknis Konstruksi Proyek-Proyek Pembangunan dari Daerah Daerah Tingkat II DIY(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1961 Seri A, Nomer );
55. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pengesahan Perhitungan Anggaran dan Penyusunan/Penetapan Anggaran Keuangan Daerah DIY(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1963 Seri A, Nomer 1);
56. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1964 tentang Penghijauan Tanah Kosong;
57. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1966 tentang Larangan Judi bagi Pegawai Pemerintah Daerah DIY;
58. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1967 tentang Kedudukan Keuangan Anggota DPRD GR dan Anggota-anggota BPH DIY(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1969 Seri A, Nomer 3);
59. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1968 tentang Pernyataan berlakunya PP No. : 19/1952 tentang Pemberian Pensiun kepada Jada dan Tunjangan kepada Anak Yatim Piatu Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Daerah DIY(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1969 Seri A, Nomer 1);
60. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1969 tentang Jumlah Uang Tetempuh (uang wajib) untuk Tanah yang diberikan dengan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1970 Seri A, Nomer 3);
61. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1969 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1971 Seri A, Nomer 1);
62. Peraturan Daerah Nomor 11/k/DPRD/1971 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD GR DIY;
63. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1971 tentang Peningkatan beberapa Jalan Kabupaten(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1972 Seri A, Nomer 2);
64. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1971 tentang Pembubaran-Perusahaan Daerah BANGUN KARYA(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1973 Seri A, Nomer 3);
65. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1971 tentang Pendirian Perusahaan Terbatas PUROSANI;
66. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pemasangan Label Barang-Barang Kerajinan Perak(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1972 Seri A, Nomer 4);
67. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1972 tentang Bentuk serta Prosedur Pengundangan Peraturan Daerah DIY dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1972 Seri A, Nomer 5);
68. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun Tahun 1974 tentang Wewenang dan Pertanggungan Jawab Pengelolaan Pengairan di DIY(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1979 Seri D, Nomer 2);
69. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Peningkatan Jalan Janti-Gedong Kuning menjadi Jalan Propinsi (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1979 Seri D, Nomer 4);
70. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1977 tentang Perubahan PD DIY No. : 6/1969 Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1979 Seri A, Nomer 1);
71. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun Tahun 1977 tentang Jasa lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya serta Ketentuan besarnya Pungutan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1979 Seri B, Nomer );
72. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1977 tentang Izin Usaha dan Retribusi Perusahaan Hotel Nasional dalam Wilayah DIY;
73. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun /1977 tentang Uang Sempadan;
74. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 977 tentang Izin Dispensasi Pemakaian Jalan dan Jembatan;
75. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun /1977 tentang Izin Tempat Pemasangan Reklame;
76. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1978 tentang Peningkatan Beberpa Jalan Kabupaten menjadi Jalan Propinsi. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1979 Seri D, Nomer 29);
77. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1978 tentang Pola Dasar Pembangunan Propinsi DIY(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1979 Seri D, Nomer 30);
78. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1980 tentang Perubahan pasal 3 ayat (1) PD Prop. DIY No. 2 Th 1978 Tentang Izin Pengambilan Kayu Bakar Rencek dan Daun Jati pada Hutan serta Bea Masuk Hutan Wisata(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1981 Seri B, Nomer 1);
79. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1980 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi DIY(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1981 Seri D, Nomer 1);
80. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1980 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Propinsi DIY(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1981 Seri D, Nomer 2);
81. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1980 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Propinsi DIY(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1981 Seri D, Nomer 3);
82. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kehutanan Propinsi DIY(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1981 Seri D, Nomer 4);
83. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Propinsi DIY(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1981 Seri D, Nomer 5);
84. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi DIY(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1984 Seri D, Nomer 68);
85. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi DIY(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1989 Seri D, Nomer 1);
86. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1988 tentang Keringanan dan Pembebaan Denda BBNKB Kedua dan Seterusnya di Propinsi DIY;
87. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1992 tentang Penyisihan Sebagian Hasil Penerimaan PBB Bagian Pemerintah Propinsi DIY Kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan Se Propinsi DIY(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1993 Seri D, Nomer 3);
88. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Struktur Tata Ruang Wilayah Propinsi DIY(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1994 Seri C, Nomer 1);
89. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi DIY Nomor 1 Tahun 1990 tentang Uang Leges(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1996 Seri B, Nomer 1);
90. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1996 tentang Kedudukan keuangan Ketua, wakil Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Propinsi DIY(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1997 Seri D, Nomer 32).

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta

|  |
| --- |
| pada tanggal  SEKRETARIS DAERAH  DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  ICHSANURI  LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN NOMOR |